

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelaahan penelitian terdahulu merupakan bagian dari upaya peneliti dalam mencari perbandingan dan relevansi untuk memberikan inspirasi baru. Pada penelitian terdahulu, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda dengan penjabaran yang ringkas mungkin. Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis kaji.

Penelitian pertama dilaksanakan oleh Andi Ansar Firman pada 2021 dengan berjudul, “Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas”. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan yang dilakukan sebagaimana dalam suatu komunitas memiliki dimensi strategis dalam upaya penggalan potensi dan pengembangan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut diorientasikan dalam pemenuhan kepentingan warga masyarakat setempat melalui pemberian peran kepada masyarakat dengan kaitannya dalam keikutsertaan proses formulasi, implementasi, dan monitoring evaluasi terhadap kegiatan. Penguatan komunitas lokal menjadi salah satu kekuatan dalam mengoptimalkan terlaksananya pemberdayaan berbasis masyarakat tersebut.

Penelitian tersebut memiliki relevansi, yang mana peneliti berupaya menganalisis pemberdayaan dalam skala masyarakat desa. Pemberdayaan yang dimaksud juga dalam lingkup suatu komunitas tertentu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti potensi daerah setempat hingga fasilitas penunjang yang dapat mewartakan masyarakat sekitar dalam usaha pembangunan masyarakat desa yang lebih merata dan stabil. Namun,

terdapat sejumlah perbedaan yang ditemui dalam penelitian terdahulu, seperti upaya pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat desa setempat berfokus pada beberapa aspek, seperti ekonomi, budaya, sosial, hingga politik, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji hanya berfokus dalam bidang ekonomi. Dalam penelitian terdahulu mencakup masyarakat desa setempat, sedangkan penelitian yang akan dikaji yaitu berfokus pada komunitas pedagang di pesisir pantai.

Penelitian kedua dilaksanakan oleh Tukino dan Mariyatul pada 2021 dengan berjudul, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Kemitraan Pengembangan Potensi Desa”. Dalam penelitian tersebut bahwa program pemberdayaan masyarakat berupa pola kemitraan dalam pengembangan potensi ekonomi pedesaan mampu menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam menentukan program kegiatan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi menjadi acuan awal dalam menggerakkan perekonomian yang terdapat di desa guna menuju ekonomi desa yang mandiri. Selama berjalannya proses pemberdayaan, masyarakat setempat mampu berperan aktif dalam setiap kegiatan, seperti halnya dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Relevansi yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu dalam kedua penelitian tersebut ingin memberdayakan kelompok masyarakat dalam sebuah desa yang berfokus guna meningkatkan pembangunan dan stabilitas ekonomi masyarakat di desa setempat. Terlebih lagi, pemerintah desa turun berperan aktif dalam membantu masyarakat binaan guna mewujudkan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi. Di antara perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas adalah jika dalam penelitian terdahulu terdapat pola

kemitraan antara pemerintah desa, dosen, dan mahasiswa, sedang dalam penelitian yang akan dikaji hanya pemerintah desa saja yang menjadi pemangku kepentingan.

Penelitian ketiga dilaksanakan oleh Ramlan Darmansyah pada 2020 dengan berjudul, “Meninjau Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandau Jaya Melalui Kebijakan Program Produk Unggulan Tahun 2019”. Berdasarkan dalam hasil dan pembahasan yang terdapat dalam penelitian dapat diketahui bahwa program pemberdayaan yang dibentuk oleh Desa Pandau Jaya melalui kebijakan program produk unggulan 2019 tersebut menjadi bagian dari program prioritas Kementerian Desa. Program pemberdayaan produk pepaya madu unggul didasarkan pada APBD, yang mana sudah diprioritaskan sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah desa setempat membantu dalam pelaksanaan program produk unggulan sebagaimana termuat pada surat keputusan kepala desa.

Relevansi yang dapat dilihat dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu pemerintah desa keduanya mengharapkan dari adanya pemberdayaan tersebut dapat menjadikan masyarakat yang semakin mandiri dalam pengelolaan usaha yang dilakukan. Melalui program pemberdayaan yang terdapat dalam kedua penelitian tersebut saling mengedepankan produk unggul atau potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Akan tetapi, terdapat sejumlah perbedaan yang terdapat dalam kedua penelitian tersebut. Dalam penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa sasaran binaan yang dimaksud yaitu para kelompok petani pepaya madu yang terdapat di desa sekitar, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji ini lebih mengarah pada kelompok atau komunitas pedagang di pesisir pantai dengan produk unggulan berupa ikan.

Penelitian keempat dilaksanakan oleh Didiek Tranggono, Praja Firdaus Nuryananda, dan Andre Yusuf Trisna Putra pada 2020 dengan judul, “Pemberdayaan

Perempuan Nelayan dalam Peningkatan Produksi Kerupuk Kerang di Desa Bluru, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo”. Dalam tulisan tersebut memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menyoar pada perempuan nelayan Desa Bluru Kidul melalui kekayaan lokal utama mereka. Pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan memberikan hasil dalam niat dan semangat para perempuan nelayan yang berangsur-angsur semakin tinggi. Sebagaimana dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi sejak awal menunjukkan semakin berdayanya para perempuan nelayan yang dapat diketahui dengan semakin meningkatnya jumlah produksi dan pendapatan yang dimiliki.

Relevansi terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu pada kedua penelitian tersebut dapat diketahui memiliki kesamaan dalam subjek pemberdayaan berbasis masyarakat, yaitu merujuk pada kelompok dengan kategori pedagang. Namun, pada peneliti terdahulu dapat diketahui bahwa dalam penelitian tersebut berfokus dalam perempuan nelayan yang menjadi sasaran dalam pemberdayaan, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti tidak memiliki kategori khusus atau mengotak-ngotakkan gender.

Penelitian kelima dilaksanakan oleh Ahmad, Abdul Mahsyar, dan Anwar Parawangi pada 2021 dengan judul, “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar”. Dalam tulisan tersebut, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan program pemberdayaan dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan pendekatan berupa sintesis *top-down* dan *bottom up*. Keterlibatan aktor terkait selama pelaksanaan program didasarkan pada regulasi yang berlaku, yang mana ditetapkan oleh lembaga terkait. Terdapat sejumlah lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaannya, mulai dari

pemerintah pusat hingga pemerintah daerah setempat. Kepatuhan para pihak terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Namun, di balik hal pelaksanaannya terdapat kasus penyelewengan jabatan yang berpengaruh langsung terhadap responsivitas anggaran pelaksanaan program.

Relevansi yang dapat dilihat dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan pada pelaksanaan program dengan melibatkan sejumlah aktor yang mumpuni agar pelaksanaan pemberdayaan dapat didampingi oleh pihak yang berkompeten. Namun, terdapat perbedaan yang terdapat di keduanya, yaitu pada penelitian terdahulu memiliki fokus pelaksana pada tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten setempat, sedangkan penelitian yang akan diteliti dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Nglebeng Kabupaten Trenggalek, sehingga pemerintah desa tersebut secara langsung membuat program terhadap masyarakat.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Andi Ansar Firman. 2021. Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas. Jurnal Tata Sejuta.	Berdasarkan dalam hasil kajian tersebut dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas memiliki dimensi strategis dalam penggalian potensi dan pengembangan kapasitas, yang mana	Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, yang mana peneliti berupaya menganalisis pemberdayaan dalam skala masyarakat desa. Pemberdayaan yang dimaksud juga dalam lingkup suatu komunitas tertentu

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
		<p>berorientasi pada kepentingan warga masyarakat desa setempat. Pemberdayaan masyarakat yang diberikan berupa pemberian peran kepada masyarakat kaitannya dalam keikutsertaan tahapan formulasi, implementasi, dan monitoring evaluasi terhadap kegiatan tematik di wilayah desa sekitar. Dengan terdapatnya kegiatan musyawarah dan gotong royong masyarakat desa semakin kuat, keterlibatan komunitas lokal desa dapat membangun konstruksi sosial politik yang positif dan progresif. Peran masyarakat desa dalam</p>	<p>dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti potensi daerah setempat hingga fasilitas penunjang yang dapat mawadahi masyarakat sekitar dalam usaha pembangunan masyarakat desa yang lebih merata dan stabil. Namun, terdapat sejumlah perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu, seperti upaya pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat desa setempat berfokus pada beberapa aspek, seperti ekonomi, budaya, sosial, hingga politik, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji hanya berfokus dalam bidang ekonomi. Terdapatnya perbedaan sasaran komunitas dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penelitian terdahulu mencakup masyarakat desa setempat, sedangkan penelitian</p>

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
		kegiatan desa dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya.	yang akan dikaji yaitu berfokus pada komunitas pedagang di pesisir pantai.
2	Tukino dan Mariyatul Qibtiyah. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Kemitraan Pengembangan Potensi Desa. Jurnal UBP Karawang.	Dalam penelitian tersebut bahwa program pemberdayaan masyarakat berupa pola kemitraan dalam pengembangan potensi ekonomi pedesaan mampu menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam menentukan program kegiatan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi menjadi acuan awal dalam menggerakkan perekonomian yang terdapat di desa guna menuju ekonomi desa yang mandiri. Selama berjalannya proses pemberdayaan,	Terdapat persamaan yang dapat ditemukan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dikaji, yaitu dalam kedua penelitian tersebut ingin memberdayakan kelompok masyarakat dalam sebuah desa yang berfokus guna meningkatkan pembangunan dan stabilitas ekonomi masyarakat di desa setempat. Terlebih lagi, pemerintah desa turun berperan aktif dalam membantu masyarakat binaan guna mewujudkan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi. Diferensiasi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji yaitu, jika dalam penelitian terdahulu terdapat pola

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
		<p>masyarakat setempat berperan aktif dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.</p> <p>Pelaksanaan program pemberdayaan dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut. Pertama, kegiatan pengenalan masyarakat yang diawali dengan survei lokasi pemberdayaan guna mengetahui potensi dan kebutuhan yang diharapkan masyarakat setempat. Kedua, rancangan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berupa pendampingan atau pemberian arahan, serta pemberian motivasi bagi</p>	<p>kemitraan antara pemerintah desa, dosen, dan mahasiswa, sedang dalam penelitian yang akan dikaji hanya pemerintah desa saja yang menjadi pemangku kepentingan.</p>

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
		<p>masyarakat. Ketiga, seminar yang diharapkan agar masyarakat memperkuat usaha masyarakat dalam membangun ekonomi desa yang mandiri. Dengan demikian, pemberian bimbingan, pembinaan, konseling atau diskusi bersama dengan masyarakat sekitar dapat menjadi penguat dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat desa.</p>	
3	<p>Ramlan Darmansyah. 2020. Meninjau Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandau</p>	<p>Berdasarkan dalam hasil dan pembahasan yang terdapat dalam penelitian dapat diketahui bahwa program pemberdayaan di Desa Pandau Jaya yang dilaksanakan melalui</p>	<p>Kesamaan yang dapat ditinjau dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu pemerintah desa keduanya mengharapkan dari adanya pemberdayaan tersebut dapat menjadikan masyarakat yang</p>

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
	Jaya Melalui Kebijakan Program Produk Unggulan Tahun 2019. Jurnal Government.	kebijakan program produk unggulan 2019 tersebut dibentuk oleh pemerintah desa terkait berdasarkan program prioritas Kementerian Desa. Program pemberdayaan produk pepaya madu unggul didasarkan pada APBD, yang mana sudah diprioritaskan sebelumnya. Sementara itu, pemerintah desa membantu dalam pelaksanaan program produk unggulan sebagaimana dimuat pada surat keputusan kepala desa.	semakin mandiri dalam pengelolaan usaha yang dilakukan. Melalui program pemberdayaan yang terdapat dalam kedua penelitian tersebut saling mengedepankan produk unggul atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Akan tetapi, terdapat sejumlah perbedaan yang terdapat dalam kedua penelitian tersebut. Dalam penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa sasaran binaan yang dimaksud yaitu para kelompok petani pepaya madu yang terdapat di desa sekitar, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji ini lebih mengarah pada kelompok atau komunitas pedagang di pesisir pantai dengan produk unggulan berupa ikan.
4	Didiek Tranggono,	Berdasarkan dalam uraian penelitian tersebut dapat	Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
	Praja Firdaus Nuryananda, dan Andre Yusuf Trisna Putra. 2020. Pemberdayaan Perempuan Nelayan dalam Peningkatan Produksi Kerupuk Kerang di Desa Bluru, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Abdimas Bela Negara.	diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menasar pada perempuan nelayan Desa Bluru Kidul melalui sumber daya lokal utama mereka. Pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan memberikan hasil dalam niat dan semangat para perempuan nelayan yang berangsur-angsur semakin tinggi. Sebagaimana kegiatan pelatihan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi sejak awal menunjukkan semakin berdayanya para perempuan nelayan yang dapat diketahui dengan semakin meningkatnya	akan diteliti oleh peneliti, yaitu terdapat dalam penggunaan pendekatan penelitian yang sama yaitu berupa pendekatan kualitatif. Dalam hal tersebut dapat diketahui juga memiliki kesamaan dalam subjek pemberdayaan berbasis masyarakat, yaitu merujuk pada kelompok dengan kategori pedagang. Namun, terdapat perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu dalam penelitian tersebut berfokus dalam perempuan nelayan yang menjadi sasaran dalam pemberdayaan, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti tidak memiliki kategori khusus atau mengotak-ngotakkan gender.

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
		jumlah produksi dan pendapatan yang dimiliki.	
5	Ahmad, Abdul Mahsyar, dan Anwar Parawangi. 2021. Komunitas Masyarakat Pesisir di Tambak Lorong Semarang. Jurnal Kolaborasi.	Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa pelaksanaan program pemberdayaan dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan pendekatan berupa sintesis <i>top-down</i> dan <i>bottom up</i> . Keterlibatan aktor terkait selama pelaksanaan program didasarkan pada regulasi yang berlaku, yang mana ditetapkan oleh lembaga terkait. Terdapat sejumlah lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaannya, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah setempat. Kepatuhan para pihak	Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti memiliki kesamaan pada pelaksana program dengan melibatkan sejumlah aktor yang mumpuni agar pelaksanaan pemberdayaan dapat didampingi oleh pihak yang berkompeten. Namun, terdapat perbedaan yang terdapat di keduanya, yaitu pada penelitian terdahulu memiliki fokus pelaksana pada tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten setempat, sedangkan penelitian yang akan diteliti dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Nglebeng Kabupaten Trenggalek, sehingga pemerintah desa tersebut secara langsung membuat program terhadap masyarakat.

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
		terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Namun, di balik hal pelaksanaannya terdapat kasus penyelewengan jabatan yang berpengaruh langsung terhadap responsivitas anggaran pelaksanaan program.	

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang terdapat di atas, maka kebaruan sekaligus perbedaan yang ditemukan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji yaitu terkait implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pada kelompok pedagang pesisir pantai yang secara kualitatif yang ditinjau melalui keilmuan sosiologi dengan menggunakan teori pemberdayaan oleh Jim Ife. Adapun kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kepada suatu kelompok sosial masyarakat.

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 Implementasi Kebijakan

Nugroho (2015) menerangkan terkait implementasi kebijakan, yang mana pada prinsipnya merupakan metode yang digunakan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Pada substansinya, kebijakan publik dimaknai sebagai mekanisme pelaksanaan kebijakan dengan baik agar tercapainya tujuan yang ditetapkan para pemangku kebijakan (Kadji, 2015). Upaya mengimplementasikan kebijakan dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu secara langsung dalam bentuk program atau melalui pembuatan kebijakan yang dapat menjadi sebuah hasil dan turunan dari kebijakan publik tersebut. Berangkat dari hal tersebut, segala bentuk program maupun proyek dapat dikatakan sebagai bagian dari implementasi kebijakan (Siregar, 2022).

Kebijakan tidak terlepas dari proses pengambilan keputusan dalam lingkup publik, sehingga para politisi, konsultan, dan pejabat pemerintah terkait diperlukan dalam melakukannya. Para aktor tersebut memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui sejumlah pertimbangan dan faktor akan menentukan hasil atau *output*, seperti halnya interaksi para pembuat keputusan maupun materi program yang tengah ataupun ingin dicapai. Suatu kebijakan diciptakan sebagai bentuk dalam mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya tujuan yang disepakati bersama.

Dalam usaha mengimplementasikan suatu kebijakan, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang dapat digunakan dalam indikator dalam proses implementasi kebijakan yang dapat merujuk aksi kebijakannya. Keberhasilan yang dapat diciptakan dalam implementasi kebijakan publik dapat ditentukan melalui tingkat terlaksananya suatu kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan dan lingkup implementasi. Isi kebijakan dapat meliputi kepentingan suatu kelompok sasaran, tipe manfaat yang diharapkan oleh

pemangku kepentingan, tingkat perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksanaan program yang telah ditetapkan, dan sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sedangkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, sifat lembaga dan penguasa, dan kepatuhan dan kemampuan untuk menangkap pihak yang terkait merupakan bagian dari aspek lingkungan implementasi kebijakan.

Implementasi menjadi sebuah aksi yang merujuk pada pelaksanaan program ke dalam dampak. Menurut Subianto (2020), terdapat tiga langkah utama untuk menerapkan kebijakan sebagai berikut.

1. Aktivitas interpretasi menerjemahkan arti dan program ke bentuk yang dapat digunakan dan diterima.
2. Organisasi, sebagai sarana dalam mengimplementasi program.
3. Aplikasi, berkaitan dengan perlengkapan rutin bagi dukungan pelayan.

Adapun terdapat unsur-unsur dari proses implementasi menurut Subianto (2020) sebagai berikut.

1. Proses implementasi program/kebijakan merupakan jenis tindakan yang dilakukan dalam melanjutkan program atau kebijakan mencakup keputusan, tindakan strategis, dan operasional yang bertujuan dalam memifestasikan program atau kebijakan. Hal tersebut diharapkan agar terpenuhinya tujuan kebijakan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Proses implementasi dapat diklasifikasikan dalam kategori berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal berdasarkan hasil yang hendak dicapai atau *outcomes*. Hal ini disebabkan terdapatnya sejumlah fakta selama proses tersebut terlibat, sehingga banyak pihak yang memiliki peran yang signifikan dalam mendukung atau menghambat dalam perealisasi sasaran program.

3. Proses implementasi setidaknya memiliki tiga komponen penting, yaitu:
  - a. Terdapatnya kebijakan atau program yang berlaku.
  - b. Target kelompok.
  - c. Komponen eksekutif (implementor).
4. Implementasi program atau kebijakan, tidak dapat dilaksanakan pada ruang hampa/steril, sehingga perlunya sejumlah komponen pendukung, seperti fisik, sosial, budaya, dan politik dalam mempengaruhi bagaimana suatu program pembangunan dijalankan.

Subianto (2020) dalam bukunya dengan judul “Kebijakan Publik” menjelaskan bahwa proses implementasi secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang akan dibahas pada langkah-langkah berikut.

1. Hasil dari keputusan badan pelaksana terkait kebijakan.
2. Kepatuhan kelompok tujuan pada keputusan tersebut.
3. Pengaruh nyata dari keputusan yang dibentuk oleh badan pelaksana.
4. Persepsi tentang konsekuensi dari keputusan tersebut.
5. Evaluasi hubungan antara sistem politik dan undang-undang.

### **2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan pada umumnya merujuk pada sekelompok atau organisasi yang terdapat dalam suatu wilayah dengan meninjau potensi atau sumber daya yang dimiliki. Penguatan nilai-nilai, pemberian daya, dan kebebasan bertindak menjadi tujuan dalam setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dari setiap individu tersebut memiliki kemandiri. Menurut Soetomo (2014), pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan dalam mengubah keadaan suatu masyarakat dengan standar hidup yang sangat rendah menuju kondisi yang lebih baik, seperti halnya pada bidang ekonomi,

politik, hingga sosial budaya. Bertahan hidup dalam masyarakat dapat dicapai melalui keberdayaan masyarakat, yang mana memungkinkan adanya pengembangan diri dan pencapaian kemajuan. Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu membawa masyarakat pada suatu wilayah yang menunjukkan kemajuan ke arah lebih baik daripada yang ditunjukkan sebelumnya.

Pemberdayaan yang baik pada umumnya merupakan pemberdayaan yang memiliki orientasi untuk pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga seseorang dalam masyarakat dapat hidup dan terpenuhinya kebutuhan mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain (Nadhifa Fitria, 2019). Pemberdayaan memberikan semangat dalam memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dengan memberi sejumlah motivasi, penggalan potensi yang dimiliki, dan pengarahan agar dapat memenuhi kebutuhan (Nofriansyah, 2018). Penerapan musyawarah mufakat bagi setiap masyarakat dapat menjadi wujud kesempatan dalam berpartisipasi dalam pembangunan berdasarkan konteks kehidupan masing-masing. Pemberdayaan menjadi sarana demokrasi dengan memberi ruang bagi masyarakat dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan di dalamnya.

Mardikanto dkk (2003) menyebutkan bahwa terdapat enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.

1. Perbaiki Kelembagaan (*Better Institution*)

Terdapatnya perbaikan dalam aktivitas/perilaku yang dilakukan, maka diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan dan pengembangan jaringan kemitraan suatu usaha.

2. Perbaiki Usaha (*Better Business*)

Perbaiki pendidikan dengan meningkatkan semangat dalam belajar, akses bisnis lintas, aktivitas, dan perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki usaha yang dijalankan.

3. Perbaiki Pendapatan (*Better Income*)

Terdapatnya perbaikan bisnis yang dijalankan, maka diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan penghasilan yang didapatkan serta pendapatan bagi keluarga dan masyarakat.

4. Perbaiki Lingkungan (*Better Environment*)

Dengan perbaikan pendapatan dapat mewujudkan perbaikan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Kerusakan lingkungan pada umumnya ditemui karena terdapatnya kemiskinan atau penghasilan masyarakat yang cukup terbatas.

5. Perbaiki Kehidupan (*Better Living*)

Kondisi pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik berkaitan dengan perbaikan kondisi kehidupan masing-masing anggota keluarga.

6. Perbaiki Masyarakat (*Better Community*)

Kehidupan yang cenderung lebih baik dapat mendukung terwujudnya lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik pula. Hal tersebut dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih unggul.

Setidaknya terdapat tiga strategi yang dapat diupayakan dalam melaksanakan pemberdayaan pada kelompok-kelompok yang dirugikan dan lemah menurut Jim Ife (2016) sebagai berikut.

1. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dengan membangun atau mengubah organisasi serta institusi dalam meningkatkan kesetaraan akses untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Perjuangan dan perubahan pemerintah memungkinkan pemberdayaan melalui tindakan sosial dan politik untuk mewujudkan kekuasaan secara efektif, sehingga pendekatan aktivis harus mengambil tindakan langsung.
3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyar-tahuan yang berpusat pada proses pembelajaran untuk meningkatkan taraf kemandirian masyarakat dan sistem operasi dengan diberikannya pembekalan kosa kata dan kemampuan untuk melakukan perubahan dengan lebih efisien.

Menurut Soemodiningrat, terdapat 3 (tiga) aspek dalam pemberdayaan yang dapat diketahui, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*.

1. *Enabling*

Berdasarkan definisinya dapat diketahui sebagai suatu iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Hal tersebut didasarkan melalui fakta bahwa setiap individu memiliki potensi yang beragam, tetapi pada kenyataannya tidak terdapatnya motivasi atau karena terdapatnya keterbatasan dalam diri individu, sehingga potensi yang ada tidak mampu berkembang secara maksimal. Dengan demikian, perlunya terciptanya iklim yang dapat mendukung dalam pengembangan potensi.

2. *Empowering*

*Empowering* dinilai sebagai cara dalam memperkuat daya tarik atau potensi dalam masyarakat. Penguatan potensi tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui tahapan-tahapan yang dapat melibatkan sumber daya (*input*) serta mampu

memanfaatkan segala jenis peluang (*opportunities*) yang ada. Pemberdayaan pada dasarnya menjadi upaya penting dalam peningkatan taraf hidup, seperti halnya dalam pendidikan, kesehatan serta dalam mendapatkan akses ke sumber ekonomi yang menghasilkan kemajuan, seperti modal, teknologi, dan informasi.

### 3. *Protecting*

Pemberdayaan diartikan juga sebagai bentuk untuk melindungi serta melaksanakan pembelaan dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat minoritas atau lemah. Dengan demikian, perlindungan kepada masyarakat yang lebih lemah dan rendah menjadi konsep mendasar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Melindungi adalah usaha untuk mencegah eksploitasi dan ketidakseimbangan dalam persaingan.

Sebagai tolak ukur dalam keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan, maka terdapat 5 (lima) indikator yang dapat diterapkan sebagai berikut.

1. Kebebasan mobilitas yang dimaksud sebagai individu dalam masyarakat dapat dengan bebas bergerak kemanapun yang diinginkan tanpa adanya larangan atau pembatasan dari orang lain.
2. Terbebas dari dominasi, yaitu bebas dalam melakukan apapun yang dikehendaki tanpa adanya rasa dominasi atau paksaan dari pihak atau orang lain.
3. Kesamaan setiap individu atas kedudukannya di mata hukum, sehingga setiap orang berhak atas aspirasinya dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan.
4. Sadar hukum dan politik, yaitu individu yang telah berdaya dan memiliki kapasitas yang baik tentunya dapat memiliki kesadaran untuk patuh terhadap

hukum yang berlaku di masyarakat, serta dapat sadar dan bertanggung jawab terhadap hukuman atas pelanggaran yang dilakukan.

5. Terdapatnya jaminan ekonomi, sebab setiap individu dalam masyarakat yang telah berhasil memberdayakan dirinya akan mampu memenuhi kebutuhan diri, mulai dari yang bersifat mendasar agar individu tidak bergantung lagi terhadap orang lain.

### **2.2.3 Kelompok Sosial**

Kelompok merupakan dua atau lebih dari individu yang berinteraksi satu sama lain secara langsung dan tidak langsung, serta peduli dengan hubungan dalam grup dan antara mereka, serta peduli satu sama lain dengan ketergantungan positif untuk mencapai tujuan bersama (Johnson, 2009). Kelompok dapat diartikan sebagai model pengembangan struktur relasi secara internal para anggota dengan terdapatnya pertukaran dan pengembalian nilai, norma, status, dan peranan, yang mana di dalamnya terdapat kesamaan atas identitas yang terikat karena terdapatnya persamaan perasaan dan kepentingan (Liliweri, 2014).

Kelompok sosial (*social group*) merupakan kumpulan atau kelompok orang yang tinggal bersama, karena terdapatnya hubungan di antara mereka (Soekanto dan Sulistyowati, 2013). Purwasih, dkk (2018) memaknai kelompok sosial sebagai kumpulan dari individu yang memiliki kesadaran bersama dalam keanggotaannya dan terdapatnya saling keterikatan berinteraksi. Dalam suatu kelompok sosial juga memuat rasa kecenderungan untuk tidak terbentuk secara statis, melainkan terus berubah, baik dalam aktivitas maupun bentuknya, dengan menambahkan alat tambahan untuk melakukan fungsinya (Soekanto dan Sulistyowati, 2013).

Menurut Soekanto dan Sulistyowati (2007) terdapat sejumlah persyaratan dalam pembentukan suatu kelompok sosial sebagai berikut.

1. Terdapatnya kesadaran dalam setiap anggota kelompok dan menyadari akan keanggotaannya pada kelompok yang bersangkutan;
2. Terdapat hubungan timbal-balik antar anggota kelompok yang satu dengan lainnya;
3. Terdapat kepemilikan faktor bersama, sehingga hubungan antar anggota bertambah erat dengan terdapatnya kesamaan nasib, tujuan, kepentingan, ideologi politik, dan lain sebagainya;
4. Terdapatnya kepemilikan struktur, kaidah, dan pola perilaku;
5. Bersistem dan berproses.

#### **2.2.4 Masyarakat Pesisir**

Menurut Yistiarani, masyarakat pesisir dapat ditinjau dari kelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu kawasan pesisir dan sumber pencahariannya bergantung pada sumber daya laut yang digunakan (Yistiarani, 2020). Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bermukim di daerah pesisir, yang mana mereka menggantungkan kehidupan pada hasil laut sebagai sumber mata pencaharian (Mam, 2018). Pada dasarnya, nelayan menjadi mayoritas profesi yang dijalankan oleh para masyarakat pesisir dengan disusul oleh budidaya ikan hingga petambak. Secara umum, masyarakat pesisir dan nelayan memiliki faktor-faktor yang turut memengaruhi struktur ekonomi, sosial, hingga kebijakan (Yistiarani, 2020).

Masyarakat pesisir memiliki beberapa karakteristik berbeda dengan masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dapat mengatasi sumber daya saat ini yang tersedia secara terbuka (Satria, 2015). Kondisi

tersebut menyebabkan para nelayan harus melaksanakan perpindahan secara terus menerus untuk mendapatkan penghasilan maksimal. Melalui karakteristik lingkungan tersebut menjadikan sejumlah masyarakat pesisir memiliki karakteristik tegas, keras, dan terbuka.

Adapun sejumlah aspek yang dapat memperjelas dalam menggambarkan karakteristik masyarakat pesisir yang diwakili oleh jenis komunitas desa pantai dan terisolir di bawah ini.

#### 1. Sistem Pengetahuan

Kepemilikan atas pengetahuan terkait metode penangkapan ikan pada umumnya didapatkan melalui turun-temurun atau warisan orang tua terdahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Hal tersebut menjadikan masyarakat nelayan memiliki pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang begitu kuat, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Adapun pengetahuan lain yang dimiliki oleh nelayan suku laut yaitu terdapatnya konsep “Perbani”, di mana suatu kondisi air laut pasang tanggung atau surut, saat air laut berwarna merah dan tenang.

#### 2. Sistem Kepercayaan

Masyarakat pesisir masih erat kaitannya dengan kepercayaan teologis, yang mana para nelayan mempercayai bahwa laut memiliki daya magis. Perlunya perlakuan istimewa dalam melaksanakan aktivitas laut seperti dalam penangkapan ikan agar diberikan keselamatan dan hasil tangkapan yang maksimal. Namun, seiring dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang ada serta pendalaman pada nilai-nilai agama, perlakuan khusus atau upacara-

upacara tersebut bagi sebagian kelompok nelayan kini sekadar sebagai ritualisme semata.

### 3. Peran Perempuan

Perempuan yang dimaksud di sini merupakan istri dari para nelayan yang berhubungan dalam pekerjaan domestik atau rumah tangga sekaligus menjalankan aktivitas ekonomi, baik dalam penangkapan ikan di air dangkal, pengolahan, hingga kegiatan perdagangan ikan. Dalam menjaga stabilitas perekonomian rumah tangga para nelayan, mereka mendorong para istri untuk ikut dalam mencari nafkah. Berkaitan dengan hal tersebut, istri para nelayan berperan aktif dan kreatif dalam mewujudkan tradisi sosial yang sangat penting untuk kestabilan sosial di komunitas nelayan.

### 4. Posisi Sosial Nelayan

Nelayan erat kaitan dengan status yang relatif rendah hingga menyebabkan sedikit dari kalangan muda yang bersedia menjadi nelayan, selain mendapatkan penghasilan yang kurang maksimal. Meskipun demikian, para keluarga nelayan pada umumnya sangat bangga dengan profesi yang mereka miliki.

#### **2.2.5 Kelompok Nelayan**

Nelayan merupakan masyarakat yang tinggal berada di wilayah pesisir pantai dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada kegiatan pengelolaan sumber daya laut (Sastrawidjaya, 2002). Adapun menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, kelompok nelayan merupakan kumpulan sejumlah orang nelayan yang terdiri dari nelayan dewasa maupun pemula, pria yang terlibat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian, kebutuhan, dan

lingkungan. Pada umumnya, nelayan tinggal dan menetap di wilayah pesisir pantai dan membentuk suatu kelompok atau dapat disebut dengan komunitas nelayan.

Menurut Mulyadi (2005), nelayan bukan suatu entitas tunggal melainkan terdiri dari sejumlah kelompok. Nelayan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria sebagai berikut.

#### 1. Kepemilikan Alat Tangkap

##### a. Nelayan Perorangan

Nelayan perorangan merupakan seorang nelayan yang memiliki peralatan tangkap pribadi serta dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

##### b. Nelayan Buruh

Nelayan buruh merupakan nelayan yang bekerja dengan alat tangkap yang dimiliki orang lain atau pada umumnya dapat disebut sebagai pekerja nelayan dan menghasilkan upah dari juragan nelayan.

##### c. Nelayan Juragan

Nelayan juragan merupakan nelayan yang memiliki alat tangkap dan dipergunakan oleh orang lain dengan hasil tangkapan dimiliki oleh nelayan juragan, sedangkan buruh nelayan mendapat upah dari hasil tangkapan.

#### 2. Status Nelayan

##### a. Nelayan Penuh

Nelayan penuh pada umumnya hanya memiliki satu mata pencaharian yaitu sebagai nelayan dengan menggantungkan hidup serta penghasilan

dari profesi seorang nelayan dan tidak memiliki pekerjaan dan keahlian selain menjadi nelayan.

b. Nelayan Sambilan Tambahan

Nelayan tambahan dapat memiliki pekerjaan lain atau sampingan sebagai sumber penghasilan. Sedangkan profesi nelayan hanya sebagai penghasilan tambahan.

c. Nelayan Sambilan Utama

Nelayan pada jenis ini menjadikan nelayan sebagai profesi utama meskipun memiliki pekerjaan lain dalam menambah penghasilan. Apabila sebagian besar pendapatannya berasal dari kegiatan penangkapan ikan, maka dapat disebut sebagai nelayan.

3. Kepemilikan Sarana Penangkapan Ikan (Undang-Undang No. 65 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan)

a. Pemilik

Orang atau badan hukum yang memiliki hak berkuasa atau memiliki atas sesuatu kapal atau perahu serta alat-alat penangkapan ikan yang dipergunakan sebagai usaha penangkapan ikan dan dioperasikan oleh orang lain. Apabila pemilik tidak melakukan aktivitas melaut, maka dapat disebut sebagai juragan atau pengusaha. Namun, apabila pemilik sekaligus bekerja melaut untuk menangkap ikan, maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik kapal.

b. Nelayan Penggarap

Orang yang dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut dan bekerja dengan sarana penangkapan ikan milik orang lain.

4. Kelompok Kerja

a. Nelayan Perorangan

Nelayan yang memiliki fasilitas alat penangkapan ikan sendiri dalam pengoperasiannya dan tidak melibatkan orang lain.

b. Nelayan Perusahaan

Nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terikan dalam perjanjian kerja laut atau PKL dengan badan usaha perikanan.

c. Nelayan Kelompok Usaha Bersama

Gabungan dari setidaknya sepuluh orang nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir dan tergabung dalam kelompok usaha bersama non-badan hukum.

5. Jenis Perairan

a. Nelayan Perairan Umum Pedalaman

Nelayan yang pada umumnya menangkap ikan dari wilayah pantai atau sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai suatu negara.

b. Nelayan Laut

Nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar perairan lepas pantai, baik di laut teritorial negara maupun masuk dalam laut zona ekonomi eksklusif.

## 6. Mata Pencaharian

### a. Nelayan Subsistensi

Nelayan subsistensi merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan sebagai pemenuhan kebutuhan sendiri.

### b. Nelayan Asli

Nelayan asli (*indigenous/native/aboriginal fisher*) merupakan nelayan yang sedikit atau banyak memiliki katakter sama dengan kelompok pertama, tetapi juga memiliki hak dalam melakukan aktivitas secara komersil dalam skala kecil.

### c. Nelayan Rekreasi

Nelayan rekreasi (*recreatinal/sport fisher*) merupakan golongan orang yang secara prinsip melakukan aktivitas penangkapan ikan hanya sekedar dalam mencari kesenangan atau berolahraga.

### d. Nelayan Komersial

Nelayan komersial merupakan bagian dari nelayan yang menangkap ikan dengan tujuan komersial atau dipasarkan baik dalam pasar domestik maupun ekspor.

## 7. Keterampilan Profesi

### a. Nelayan Formal

Sebuah keterampilan profesi penangkapan ikan yang dipahami melalui proses belajar dan berlatih secara sistematis akademis serta bersertifikasi atau berijazah.

b. Nelayan Nonformal

Keterampilan profesi penangkapan ikan yang diturunkan atau dilatih dari orang tua atau generasi terdahulu secara nonformal.

8. Mobilitas

a. Nelayan Andon

Nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan memiliki kapal berukuran maksimal 30 *gross tonage* mengikuti ruaya kembara ikan di perairan otoritas teritorial dengan legalitas izin antar pemerintah lokal.

b. Nelayan Lokal

Nelayan yang beroperasi menangkap ikan sesuai dengan perairan wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yang mana dikeluarkan oleh otoritas pemerintah daerah setempat.

9. Teknologi

a. Nelayan Tradisional

Nelayan yang pada aktivitasnya menggunakan teknologi penangkapan sederhana. Pada umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Adapun kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.

b. Nelayan Modern

Nelayan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi penangkapan ikan dibandingkan nelayan tradisional. Terdapatnya ukuran modernitas bukan semata dalam penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, tetapi juga besar kecilnya motor yang digunakan dan tingkat eksploitasi dari alat

tangkap yang digunakan. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan jelajah operasional para nelayan.

## 10. Jenis Kapal

### a. Nelayan Mikro

Nelayan dengan aktivitas penangkapan ikan menggunakan perahu/kapal yang berukuran 0 (nol) GT (*Gross Tonnage*) hingga 10 (sepuluh) GT.

### b. Nelayan Kecil

Nelayan dengan aktivitas penangkapan ikan menggunakan perahu/kapal yang berukuran 11 (sebelas) GT (*Gross Tonnage*) hingga 60 (enam puluh) GT.

### c. Nelayan Menengah

Nelayan dengan aktivitas penangkapan ikan menggunakan perahu/kapal berukuran 61 (enam puluh satu) GT (*Gross Tonnage*) hingga 134 (seratus tiga puluh empat) GT.

### d. Nelayan Besar

Nelayan dengan aktivitas penangkapan ikan menggunakan perahu/kapal berukuran di atas 135 (seratus tiga puluh lima) GT.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Paradigma merupakan pandangan paling mendasar terkait suatu hal yang menjadi pokok persoalan dalam bidang ilmu pengetahuan (sosial) tertentu (Ritzer, 2014). Paradigma bertujuan guna membantu dalam merumuskan terkait hal yang harus dipelajari serta dalam mengimplementasikan informasi yang dikumpulkan sebagai kerangka dalam

menjawab persoalan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan paradigma fakta sosial yang mana berusaha dalam melihat masyarakat dari sudut pandang makro. Dalam hal tersebut, fakta sosial diartikan sebagai cara dalam bertindak, berpikir, dan berperasaan yang terdapat di luar individu serta saling memiliki kekuatan memaksa yang mengontrol (Ritzer, 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut, teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife digunakan dalam penelitian ini. Jim Ife mengemukakan terkait pemberdayaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, serta keterampilan kepada mereka yang kurang berdaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan tergabung dalam upaya mempengaruhi kehidupan kelompoknya. Dalam kata lain, pemberdayaan menurut Ife memiliki dua konsep penting, yaitu daya (*power*) dan ketimpangan (*disadvantaged*) (Ife dan Tesoriero, 2016).

Ife bersama Tesoriero dalam bukunya dengan judul *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* menjelaskan bahwa suatu pemberdayaan memiliki dua konsep penting, yaitu keberdayaan dan yang dirugikan, sehingga perlu terdapatnya pertimbangan dalam masing-masing pembahasan terkait pemberdayaan sebagai satu kesatuan dalam perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia (Ife dan Tesoriero, 2016). Menurut Ife (2016), pemberdayaan dapat diuraikan dalam empat kategori perspektif, yaitu perspektif pluralis, elite, struktural, dan post-struktural.

Perspektif pluralis menekankan pada keberagaman individu dan kelompok suatu masyarakat yang dalam berkompetensi guna kekuasaan dan pengaruh, dan memvisualisasikan sistem politik sebagaimana dengan suatu kompetisi antar kelompok

(Ife dan Tesoriero, 2016). Perspektif tersebut memiliki sifat konservatif, yang mana dapat menerima dan mengesahkan sistem tersebut sebagaimana mestinya. Berdasarkan perspektif pluralis, pemberdayaan merupakan proses untuk membantu kelompok atau individu yang dirugikan bersaing dengan lebih baik.

Perspektif elite memandang bahwa politik bukan alat dalam permainan, di mana semua pemain dapat mendapatkan kesempatan untuk menang. Kelompok elite dapat menjalankan otoritas di masyarakat dengan menggunakan kapasitas mereka untuk mengelola lembaga penting. Pemberdayaan dalam perspektif ini dimaksudkan untuk menumbuhkan lebih dari memiliki kemampuan berkompetisi dalam kepentingan politik dengan memainkan peran yang sebelumnya ditetapkan oleh para elite penguasa, yang mana dapat menguntungkan mereka. Demikian yang dapat dilakukan yaitu bergabung secara langsung ke aktivis partai politik para elite politik, yang mana bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi mereka (Ife and Tesoriero, 2016).

Perspektif struktural menilai terhadap kekuasaan dalam mengidentifikasi pentingnya ketidaksetaraan struktural sebagai bentuk utama dari kekuasaan. Pemberdayaan yang terdapat dalam perspektif ini menekankan pada agenda yang lebih menantang, sebab hal tersebut dapat dicapai dengan efektif apabila terdapat jenis struktur yang dapat merugikan untuk ditantang dan diatasi. (Ife and Tesoriero, 2016). Dengan kata lain, perspektif ini bertujuan untuk menghapus dari terdapatnya ketimpangan struktural, seperti gender, kelas sosial, dan etnis (Zubaedi, 2013).

Perspektif post-struktural seperti halnya dalam pandangan post-struktural atas masalah sosial, yang mana berfokus pada cara kekuasaan dipahami, penggunaan bahasa dalam mendefinisikan dan menguatkan relasi kekuasaan. Hal tersebut juga menjadi proses dalam menantang dan mengubah wacana dengan menekankan pemahaman

subjektif pada manusia dan konstruksi dan konstruksi pandangan dunia mereka. Demikian yang menjadi esensi dari perspektif ini, yaitu dalam mengubah diskursus dan menekankan intelektualitas daripada aksi atau praksis melalui pemikiran baru (Ife and Tesoriero, 2016).

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Desa Nglebeng Kecamatan Panggul memiliki keterkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat Jim Ife, yang mana Pemerintah Desa Nglebeng setempat memberikan daya (*power*) kepada Kelompok Warung Pantai Konang, yang mana merupakan kelompok dari para pedagang pesisir pantai di Desa Nglebeng Kecamatan Panggul. Kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kelompok pedagang tersebut untuk berwirausaha dengan memberikan sejumlah pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan hasil tangkapan ikan dari laut setempat. Dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan para anggota kelompok pedagang pesisir pantai tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan (*income*) dan kesejahteraan bagi masyarakat yang diberdayakan. Hal tersebut tentunya akan berdampak bagi peningkatan perekonomian desa.